

Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Loly Putri Utama¹ Nurman²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
lolyputriutama@student.uir.ac.id nurman@soc.uir.ac.id

Received : Agustus 21, 2024;

Accepted : 25 Juli 2024

Abstract

The Village-Owned Enterprise Program (BUMDes) is a government program which aims to improve the village economy and the welfare of village communities by utilizing village assets and potential. This research discusses the implementation of the Village-Owned Enterprise Program in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This research aims to determine the implementation of the village-owned enterprise (BUMDes) program in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This research was conducted at the Teratai Kelulut BUMDes Office, Kubang Jaya Village. The theoretical concept used is the implementation of Edward III's policies. The type of research used is descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews, literature study and documentation. Meanwhile, the data analysis used is descriptive analysis using the triangulation method. The results of the research show that although the implementation of the Bumdes program in Kubang Jaya Village has been carried out, the facts found in the field are that there are still many people who do not know about the existence of Bumdesa in Kubang Jaya Village, the socialization carried out is lacking, and it is only carried out individually or by personnel by visiting the community. to the house.

Key Words : Public policy, implementation, BUMDes program

Abstrak

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program milik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan aset dan potensi desa. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan di Kantor BUMDes Teratai Kelulut Desa Kubang Jaya. Konsep teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Edward III. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode triliangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program bumdes di Desa Kubang Jaya sudah terlaksana, tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bumdes di desa kubang jaya, sosialisasi yang dilakukan kurang karena dilakukan hanya secara perorangan atau personel dengan mendatangi masyarakat kerumah.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Program BUMDes

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan sebuah program pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan namanya yaitu badan usaha milik desa. Didirikannya BUMDes dimaksudkan untuk sebagai upaya dalam bentuk pengembangan potensi desa serta menampung kegiatan yang ada di desa khususnya dalam bidang perekonomian desa. Program BUMDes ini juga dapat dikategorikan sebagai gerakan membangun desa agar masyarakat desa dapat merasakan kesejahteraan sama seperti masyarakat kota. Upaya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah berkenaan dengan pemberdayaan kemampuan dari desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Adanya BUMDes didirikan untuk meratakan pembangunan serta pertumbuhan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa ini di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, yang merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk dikembangkan. Salah satu upaya dalam pengembangan desa masing-masing yang ada di Kabupaten Kampar yaitu melalui pembentukan BUMDes. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian Peraturan ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi acuan dalam pemerintah Desa Kubang Jaya dalam pembentukan BUMDes.

Desa Kubang Jaya membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 4 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang disebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Teratai Kelulut" yang berdiri pada tanggal 19 Juli 2019.

Desa Kubang Jaya memiliki banyak potensi yang bisa mendorong kemajuan desa, dari sudut ekonomi dan mata pencaharian hampir setengah luas wilayah Desa Kubang Jaya di dominasi oleh tanaman pangan dan hortikultura. Sebagian diisi oleh kawasan perkebunan seperti kelapa sawit, tanaman karet dan kebun rambutan. Selain itu sector ekonomi dan bisnis terdapat banyak pertokoan yang didomisili oleh tokoh perlengkapan harian, toko bangunan, toko baju dan fashion, dll.

Terdapat UMKM yang berkembang di desa ini mulai dari kuliner, kerajinan tangan, industri besar hingga kecil berkembang di Desa Kubang Jaya. Potensi-potensi tersebut menjadi peluang bagi BUMDes Teratai Kelulut untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Kubang Jaya. Dari potensi-potensi yang ada tersebut, masyarakat desa Kubang Jaya memiliki sasaran untuk mengelola dan membangun BUMDes di desa tersebut.

Menurut Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 4 tahun 2019 pada bab 1 dan bab 2 pasal (2) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMDes Teratai Kelulut ialah:

1. Maksud

Sebagai usaha desa, guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, penambahan lapangan kerja bagi masyarakat desa serta memajukan ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. Penambahan lapangan kerja bagi masyarakat desa;
- c. Serta memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Kubang Jaya.

Pada tahap awal dibentuknya BUMDes memiliki beberapa program/kegiatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel I. 1 : Program Kerja BUMDes Teratai Kelulut Tahun 2021/2022

No.	Program/kegiatan
1.	Usaha Angkutan Sampah Rumah Tangga
2.	Usaha Pengadaan Gas Elpiji
3.	Pasar Desa

Sumber: BUMDes Teratai Kelulut 2023

Tabel diatas menjelaskan beberapa program kerja BUMDes. Program kerja keseluruhan dimulai sejak tahun 2019. Usaha Angkutan Sampah Rumah Tangga yaitu pengambilan sampah rumah tangga bagi anggota yang bergabung dengan BUMDes. Usaha Pengadaan Gas Elpiji yaitu memperjualbelikan gas elpiji kepada masyarakat desa. Pasar Desa yaitu pasar yang diadakan atau yang dikelola oleh BUMDes dan disewakan kepada pedagang. Dengan penyertaan modal BUMDes dilakukan dua kali, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2 : Modal BUMDes

No.	Tahap	Tahun	Jumlah
1.	Tahap 1	2019	Rp. 168.000.000
2.	Tahap 2	2020	Rp. 56.000.000
Jumlah			Rp. 224.000.000

Sumber: BUMDes Teratai Kelulut 2023

Adapun jumlah anggota dan pendapatan BUMDes Teratai Kelulut dari tahun 2019-2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2 : Jumlah Anggota dan Pendapatan BUMDes Teratai Kelulut dari Tahun 2019-2021

No.	Jenis Usaha	Anggota	Pendapatan BUMDes		
			2019	2020	2021
1.	Angkutan sampah rumah tangga	80 orang	Rp. 3.240.000	Rp. 3.135.000	Rp. 3.050.000
2.	Pasar desa	145 orang	Rp. 5.760.000	Rp. 5.200.000	Rp. 4.970.000
Jumlah		225 orang	Rp. 9.000.000	Rp. 8.335.000	Rp. 8.020.000

Sumber Data: BUMDes Teratai Kelulut 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih belum berfungsinya BUMDes, contohnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes masih rendah, jika melihat target anggota di tabel 1.2 yaitu 200 orang untuk angkutan sampah dan 150 untuk pasar desa, yang terealisasi hanya 225 masyarakat yang tergabung dalam BUMDes. Persoalan ini menunjukkan bahwa program BUMDes belum berjalan secara optimal sesuai dengan tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat. Adanya 2 jenis usaha ini sudah mampu memberikan pendapatan, akan tetapi pendapatannya belum maksimal dan belum mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat Desa yang masih berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menjelaskan bahwa semenjak berdirinya BUMDes dari 3 tahun yang lalu, yaitu dari tahun 2019-2023 BUMdes belum melaporkan pendapatannya dan belum melakukan rapat tahunan.

Setelah penulis melakukan pra survey dilapangan, adapun beberapa fenomena yang ditemukan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa sejak tahun berdirinya BUMDes, tahun 2019 hingga 2022 program kerja yang direncanakan ada 3 jenis usaha, namun yang terealisasikan oleh BUMDes Kubang Jaya hanya 2 jenis usaha, yaitu angkutan sampah rumah tangga dan pasar desa.
2. Dilihat dari jumlah anggota sejak 2019 hingga 2022 masih tidak bertambah, hanya 255 orang yang bergabung, yaitu 80 orang untuk angkutan sampah dan 145 orang untuk pasar desa, padahal target untuk masyarakat angkutan sampah rumah tangga ada 200 masyarakat dan untuk pasar desa ada 150 orang.
3. Semenjak berdirinya BUMDes dari 3 tahun yang lalu, BUMDes belum melaporkan sama sekali pendapatannya dan belum berkontribusi di desa.

Tujuan dari artikel ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Tinjauan Pustaka

Loly Putri Utama dan Nurman

Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012 : 3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa lain terdiri dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani dan memenuhi, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Dahulu pengertian dan pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun seiring berjalannya waktu ilmu administrasi sangatlah maju dan berkembang baik focus maupun locusnya.

Siagian (dalam Syafri 2012 : 9) mengatakan bahwa Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah batasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang meliputi kebijakan publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas mulai tingkat kecamatan hingga tingkat pusat.

Konsep Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan. Siagian (dalam Tarmizi Yussa & Hendry Andry 2015: 14)

Organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencapai tujuan. (dalam Beddy Irawan 2017: 35)

Zulkifli (2009: 78) mengatakan organisasi dalam arti luas tidak sesederhana itu, sebagai locus dan fokus studi ilmu administrasi, organisasi dapat banyak dijabarkan dari banyak sumberdaya serta faktor lingkungan yang melingkupinya. Terutama mereka yang memandang organisasi sebagai sistem, yaitu menilai adanya keterkaitan antar dinamika organisasi dengan berbagai unsur yang melingkupinya.

Konsep organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian pembagian tugas, penunjukan staf, pen delegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. (Zulkifli, 2005:74)

Ada begitu banyak rumusan definisi yang diberikan para ahli, namun titik umum pandangannya adalah sama, yaitu suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasi atau terkoordinasi, sehingga memungkinkan orang-orang yang berda di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi privat adalah organisasi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari konsumen, organisasi ini bersifat bisnis. Sedangkan organisasi publik adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *manus* dan *agere*, *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda) dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.

George R. Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dimana pada posisi masing-masing bidang digunakan dengan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. (dalam Zulkifli, 2014;18)

Menurut Zulkifli (2014;45) fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua nya ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2014;18), menurutnya bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama, yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan dan penyempurnaan.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Friedrich adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan, sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang dimaksud. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Agustino Leo, 2020;15)

Kebijakan publik sendiri menurut Van Meter dan Van Horn memiliki 3 bagian penting yaitu :

a. Formulasi

Dimana formulasi merupakan tempat terjadinya perencanaan sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada bagian formulasi ini merupakan bagian terpenting dimana perumusan kebijakan di analisis untuk kelanjutan kebijakan pada bagian ini juga sasaran dari kebijakan di tentukan. Hal ini terkait dengan siapa yang melakukan siapa sasaran kebijakan dan siapa pelaksana kebijakan.

b. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan pada tahap formulasi sebelumnya. Pada tahap ini masuk kepada pelaksanaan kebijakan oleh pelaku kebijakan. Hal ini berkaitan pada orang yang melakukan kebijakan kepada sasaran kebijakan.

c. Evaluasi

Merupakan tahapan terakhir dari kebijakan publik. Dimana pada tahap ini merupakan tahap penilaian apakah kebijakan yang telah diterapkan atau dijalankan berhasil atau tidak. Serta apakah proses dari kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan dan tepat sasaran. Pada prosens ini kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan. Ketika ada kekurangan dalam kebijakan maka bisa ditindak lanjuti dengan perbaikan kebijakan sehingga dapat dilakukan dengan baik di kemudian hari.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah bagian terpenting dari tahap kebijakan. Implementasi dilakukan ketika sebuah kebijakan telah dirumuskan dan bertujuan jelas. Implementasi juga merupakan suatu rangkaian aktifitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan selain itu, implementasi kebijakan termasuk dalam tahap proses kebijakan, yang mana implementasi dilaksanakan ketika kebijakan telah dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas.

Diungkapkan oleh Lester & Stewart (Leo, 2020;146-147) keberhasilan satu implementasi kebijakan diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Adapun menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut George C. Edward III (Dwiyanto, 2017;31-32) menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dijelaskan juga dalam Dwiyanto (2017;33) bahwa keempat variable diatas dalam model yang dibangun Edward memiliki ketertarikan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling besinergi dalam mencapai tujuan dan satu variable akan sangat mempengaruhi variable lain.

Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4) BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa keseluruhan. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas

kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes senagai lembaga social itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyedia pelayanan social. BUMDes sebagai lembaga komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local kepasar (Wijaya,2018;93).

BUMDes adalah badan hukum yang terpisah dari pemerintahan desa dan bertujuan untuk membantu kemandian ekonomi masyarakat desa, pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Metode

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variable penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan ada pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011;52).

Hasil dan Pembahasan

Keyinformant dan Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu keyinforman dari Kantor Desa Kubang Jaya ada dua orang, yaitu Kepala Desa dan sekretaris Desa. Dari Kantor BUMDes ada tiga orang, yaitu Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Dan informan berjumlah 5 orang.

1. Komunikasi

Untuk indikator Komunikasi, sudah terjalin baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana dengan pemanfaat walaupun begitu, indikator komunikasi Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal karena sosialisasi belum dilaksanakan, hanya dalam bentuk pengarahan yang dilakukan oleh para pelaksana program. Dan dalam penyampaian informasi program, penyampaian syarat-syarat dan kebijakan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

2. Sumber daya

Untuk indikator Sumber Daya, dilihat dari kantor BUMDes itu sendiri Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal dikarenakan masih kurangnya kualitas para sumber daya manusia yaitu para pengelola BUMDes untuk menjalankan program ini, juga masih kurangnya sumber daya anggaran yang tersedia untuk insentif pelaksana.

3. Disposisi

Untuk indikator Disposisi, para pengurus BUMDes sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Disposisi Sudah Terlaksana Dengan Baik.

4. Struktur Birokrasi

Untuk indikator Struktur Birokrasi, dalam kantor BUMDes ini sudah penerapan SOP sesuai dengan SOP yang ada, walaupun begitu indikator dari struktur birokrasi ini Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal dikarenakan pada struktur organisasi masih kurangnya

sumber daya manusia yaitu pengurus yang mengakibatkan pengerjaan tugas dan tanggung jawab dari pengelola dikerjakan secara bentuk kerjasama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, bahwa implementasi program BUMDes di Desa Kubang Jaya secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya program-program BUMDes, tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya BUMDes di desa Kubang Jaya, sosialisasi yang dilakukan kurang, dan yang dilakukan hanya secara perorangan atau personel dengan mendatangi masyarakat kerumah. Dan untuk staf nya mereka yang ada dikantor hanya satu orang, dan untuk gaji mereka hanya mengerahkan dari laba usaha, jadi tidak ada gaji khusus dari pemerintah desa.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv
- Arif Yusuf Hamali dkk. 2019. *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta: CAPS
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara.
- Indiahono, Dwiyanto. 2016. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kementerian Desa. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Pusat.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Madah University Press
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta : Jakarta
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiee, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Wijaya, David. 2018. *Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Yussa, Tarmizi & Hendry Andry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli & Yogia, Moris. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation

Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.

- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan

Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan

- Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the*

Developing World, 6, 62-72.

- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Fajriyati, Alya. Herawati, Rina Agustin. Hariyani, Dyah. 2022. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)
- Adlani, Irgi Nazri. 2018. Penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya (Studi Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)
- Dani, Ade Okta Reza. Eriyanti, Fitri. 2022. Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman
- Fajrin, Shafira. 2023. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di 6 Desa Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Regulasi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, penjelasan mengenai Desa.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).